



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



T . A 2 0 2 2

Kata Pengantar

Penyajian laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 merupakan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Fungsi dan Tugas pokok Dinas.

Laporan ini merupakan gambaran Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta cara pencapaian Tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra).

Kegiatan Tahun 2022 dievaluasi dan dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan yang dialami dalam pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai jadwal.

Dalam laporan ini dapat diukur manfaat organisasi hingga terwujudnya *Good Governance* yang lebih berkualitas, transparan dan partisipatif.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022, semoga dapat bermanfaat.

Kupang, 26 Januari 2023
Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

STEFANIA TUNGA BORO, S.Pi, MM

Pembina Tingkat I
NIP. 197307141998032011

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. PENDAHULUAN.....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	1
C. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI	1
2. Sumber Daya Manusia	6
3. Aset	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI	8
1. Visi.....	8
2. Misi.....	8
3. Tujuan dan Sasaran	8
B. PROGRAM DAN KEGIATAN	10
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	10
2. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	10
3. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	10
4. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.....	11
5. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan.....	11
6. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan.....	11
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	11
D. PERJANJIAN KINERJA.....	13
1. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah	13
2. Pelaksanaan Anggaran	14
a) Belanja (program).....	14
b) Pendapatan	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	15
1. Indikator Kinerja.....	15
2. Pengukuran Kinerja	16
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN	23

1. Program Pengelolaan Ruang Laut dan Pulau-Pulau Kecil	25
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	29
3. Program Perikanan Budidaya	35
5. Program Pengelolaan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan (P3KP)	43
C. PENDAPATAN ASLI DAERAH.....	45
D. PERMASALAHAN YANG DI HADAPI	48
1. Permasalahan Yang Dihadapi	48
2. Upaya pemecahan Masalah	48
BAB. IV PENUTUP	50
A. KESIMPULAN.....	50
B. SARAN.....	50

Ringkasan Eksekutif

Dalam rangka mempertanggung jawabkan kinerja suatu organisasi secara transparan, bersih, berhasil guna, perlu disusun laporan yang Akuntabel untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi dan tujuan organisasi.

Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur diukur melalui indikator kinerja input, output, outcome dan benefit bahkan sampai dengan impact.

Secara keseluruhan dalam Tahun Anggaran 2021, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur mengelola anggaran dari 4 (Tiga) sumber dana masing-masing :

1. DPA dari APBD I

Total Anggaran DPA Tahun 2022 (Belanja Publik) sebesar Rp 49.453.248.701,- untuk 5 (lima) program dan 11 (sebelas) kegiatan dengan hasil akhir pencapaian realisasi fisik sebesar 92,66% dan keuangan 92,66 % atau Rp. 45.821.665.542,-.

2. Dekonsentrasi APBN Pusat

Pagu APBN awal sebesar Rp. 6.183.315.000,- dan pagu setelah revisi sebesar Rp. 3.940.185.000,- dengan realisasi pelaksanaan fisik mencapai 99,02% dan keuangan 99,02% atau Rp. 3.901.447.529,- .

3. Pengelolaan DAK untuk tahun 2022 yaitu Rp. 25.612.303.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 23.663.094.398,- (95,96 %) dan realisasi fisik 100%.

4. PAD Dinas Kelautan dan Perikanan untuk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 7.562.645.232.05,- dari target sebesar Rp. 18.922.100.000,- atau realisasi sebesar 39.97%.

5. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) DKP Prov. NTT Tahun 2022 sebagai berikut : Produksi Perikanan Tangkap 191.000* Ton, Produksi Perikanan Budidaya 1.169.000* Ton, luas keseluruhan kawasan konservasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah sebesar 701.548,79 ha dengan total kawasan konservasi dikelola secara efektif sebesar 276.693,38 ha, sedangkan Angka Konsumsi Ikan (AKI) untuk tahun 2022 yaitu sebesar 48,50 Kg/Kapita/Tahun.

6. Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bidang kelautan dan perikanan bersama sektor pertanian dan sektor kehutanan memberikan sumbangsih pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 4,24% dibandingkan dengan triwulan III tahun 2021 dengan total kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 29,27%

7. Capaian kinerja indikator Pendapatan asli Daerah (PAD) Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar Rp. 7.507.588.232,05 (39,68 %) dari target Rp. 18.922.100.000,00. Apabila dibandingkan dengan

tahun 2021 PAD dinas kelautan dan Perikanan mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.757.449.594,60 (30,56%) dari PAD tahun 2021 yakni sebesar Rp. 5.750.138.637,45

8. Nilai tukar nelayan pada tahun 2022 sebesar 94 mengalami kenaikan sebesar 1,45 % dari tahun 2021 yaitu 92,55.
9. Nilai tukar Pembudidaya pada tahun 2022 sebesar 103 mengalami kenaikan sebesar 10,56 % dari tahun 2021 yaitu 92,24.
10. indikator kinerja ketersediaan produk olahan perikanan tahun 2022 sebesar 100% atau sebanyak 12 produk olahan ikan. Produk olahan ikan yang di maksud yaitu : Loin Tuna, Tuna Beku, Ikan Kering, Nugget Ikan, Kaki Naga, Abon Ikan, Bakso Ikan, Se'i Ikan, Otak-Otak, Es rumput Laut, Dodol Rumput Laut dan Stik Rumput Laut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk/format pertanggungjawaban atas pelaksanaan dan pencapaian Visi dan Misi yang dibebankan kepada instansi pemerintah yang berisi informasi seputar pencapaian pelaksanaan rencana kerja. Secara umum LKIP ini bermanfaat untuk :

- Mendorong Instansi pemerintah melaksanakan *good governance*, secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan;
- Memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*);
- Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Instansi Pemerintah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya LKIP ini adalah sebagai tindak lanjut (respon) terhadap Instruksi Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan disusunnya adalah mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya Rencana Kerja Tahunan 2022.

C. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan bidang pelayanan meliputi :

1. Tugas dan Fungsi SKPD

Tugas Pokok Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, melaksanakan urusan bidang Kelautan dan Perikanan.

Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok dimaksud, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan Umum berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur;
- b. Pembinaan teknis di bidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan;
- c. Pembinaan dan pengawasan di bidang Kelautan dan Perikanan;
- d. Pembinaan dan perizinan di bidang Kelautan dan Perikanan;

- e. Pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- f. Penyelenggaraan rehabilitasi ekosistem/habitat sumberdaya kelautan;
- g. Pengelolaan Unit Instalasi Teknis;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DKP secara berjenjang, terkoordinasi, terdistribusi, efisien dan efektif, maka melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengatur uraian tugas dalam struktur organisasi DKP sebagai berikut:

a. Kepala

Merumuskan program kerja Dinas Kelautan dan Perikanan yang meliputi pengelolaan ruang laut dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan, kesekretariatan serta cabang dinas berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan kinerja pelayanan pemerintahan yang baik, cepat dan tepat sesuai kebutuhan masyarakat.

b. Sekretaris

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan program data dan evaluasi, keuangan, kepegawaian dan umum berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan administratif yang cepat, tepat dan lancar.

1) Sub Bagian Program Data dan Evaluasi

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan program, data dan evaluasi melalui pengumpulan data, mengolah dan menganalisa data serta menyusun pelaporan kinerja instansi berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tersedia program, data dan hasil evaluasi yang akurat.

2) Sub Bagian Keuangan

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan urusan keuangan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

3) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kepegawaian dan umum melalui penyiapan bahan urusan kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan serta urusan rumah tangga dan perjalanan dinas berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tercipta penataan personalia yang kompeten sesuai perkembangan demi terwujudnya pengelolaan administrasi yang tepat dan akurat.

c. Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan ruang laut dan perikanan budidaya berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan.

d. Bidang Perikanan Tangkap

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perikanan tangkap melalui pengelolaan penangkapan ikan dan kenelayanan, pengendalian dan penangkapan ikan serta sarana dan prasarana perikanan tangkap sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya peningkatan dan pengembangan perikanan tangkap secara optimal.

e. Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil melalui pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan serta penegakan hukum perikanan dan kelautan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan.

f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengembangan usaha dan pengolahan hasil perikanan dan pengembangan usaha, pengolahan dan pembinaan mutu, pemasaran dan promosi investasi berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan untuk perluasan pangsa pasar secara maksimal.

g. Cabang Dinas

Melaksanakan tugas dan fungsi dengan cara berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi cabang dinas dan memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan program sesuai dengan lingkup kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya
- 2) Koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sesuai dengan lingkup kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya
- 3) Koordinasi dan pelaksanaan administrasi sesuai dengan kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya
- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Cabang Dinas kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud terdiri atas:

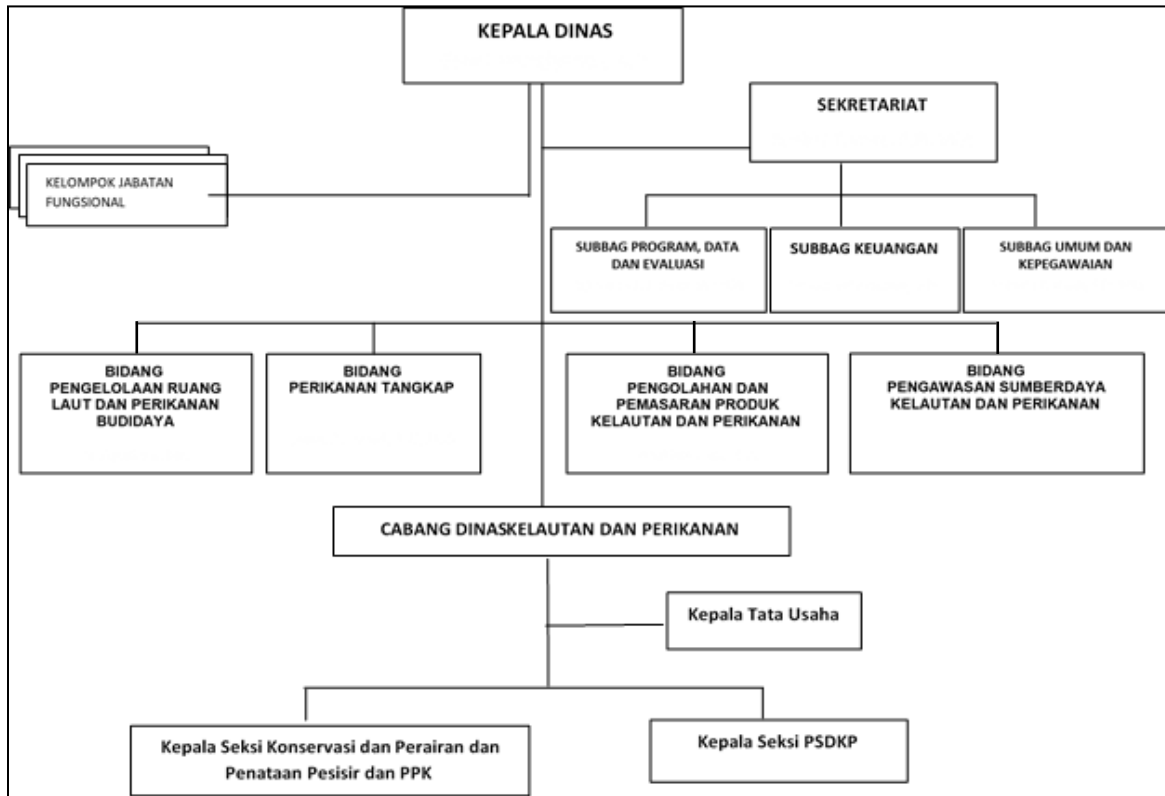
- ❖ Kepala;
- ❖ Subbagian Tata Usaha;
- ❖ Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
- ❖ Seksi Konservasi perairan, Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- ❖ Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai 7 (tujuh) Cabang Dinas yaitu :

- ❖ Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah kerja Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Sabu Raijua, di Bolok;
- ❖ Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah kerja Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Timor Tengah Selatan, di Atambua,;
- ❖ Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah kerja Kabupaten Alor di Kalabahi;
- ❖ Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah kerja Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, dan Kabupaten Sikka, di Larantuka;
- ❖ Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah kerja Kabupaten Ende, Kabupaten Nagekeo, dan Kabupaten Ngada, di Ende;

- ❖ Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah kerja Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Timur, di Labuan Bajo;
- ❖ Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah kerja Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya, di Waingapu;
 - **Kepala Cabang Dinas**
Merencanakan operasional dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan program, pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, pengelolaan kawasan konservasi perairan dan pulau-pulau kecil, dan penatausahaan cabang dinas berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan kinerja pelayanan pemerintahan yang baik, cepat dan tepat sesuai kebutuhan masyarakat.
 - **Sub Bagian Tata Usaha**
Merencanakan dan melaksanakan kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga cabang dinas berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efektif dan efisien.
 - **Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan**
Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terpeliharanya sumber daya alam hayati dan ekosistem kelautan dan perikanan.
 - **Seksi Konservasi Perairan, Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**
Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan, pemanfaatan kawasan konservasi perairan, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terpeliharanya sumber daya alam hayati dan ekosistem kelautan dan perikanan.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dibawah ini :



Gambar 1 : Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT

2. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) orang. Dari tingkat pendidikan (per 1 Januari tahun 2022) dapat diperinci, sebagai berikut :

S3 (Doktor)	: 1 Orang
S2 (Pasca Sarjana)	: 12 orang
S1 (Sarjana/Diploma-IV)	: 87 orang
Sarmud/Diploma III	: 5 orang
SLTA/Sederajat	: 27 orang
SMP/Sederajat	: 4 orang
SD	: 2 orang

3. Aset

Untuk mendukung pelaksanaan dan tugas pokok DKP-NTT, Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki aset sebagai berikut :

- a. Tanah Seluas 618.487 M2 yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota yaitu Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Alor, Lembata, Flotim, Ende, Ngada, Nagekeo, Manggarai, Sumba Barat, Sumba Timur dan Sumba Barat Daya dengan nilai sebesar Rp. 86.652.207.019,31,-;
- b. Gedung dan Bangunan sejumlah 135 (seratus tiga puluh lima) Unit dengan nilai sebesar Rp. 35.378.812.532,-;
- c. Kendaraan Roda 6 berjumlah 1 (satu) unit, Roda 4 berjumlah 16 (enam belas) Unit, Roda 3 berjumlah 3 (tiga) Unit dan Roda 2 sebanyak 58 (lima puluh delapan) Unit.

BAB. II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI

1. Visi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kelautan dan Perikanan tetap mendukung Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk tahun 2018 – 2023. Visi RPJMD 2018 – 2023 menggambarkan cita – cita yang ingin dicapai oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada kurun waktu lima tahun yaitu “NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

2. Misi

Dinas Kelautan dan Perikanan mendukung Misi kepala daerah dan Wakil Kepala daerah yaitu Misi 1 : mewujudkan masyarakat sejaterah, mandiri dan adil ; dan misi yang ke – 2 yakni membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*Ring of Beauty*).

3. Tujuan dan Sasaran

Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Nusa Tenggara Timur sesuai dengan Visi dan Misi tersebut di atas, pada hakekatnya ditujukan untuk :

a. Tujuan

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan dalam kerangka pembangunan jangka menengah adalah

- 1) Menciptakan kemandirian dan stabilitas usaha kelautan dan perikanan ;
- 2) Menciptakan masyarakat perikanan yang berkeadilan sosial;
- 3) Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil serta pemanfaatan sumber daya alam kelautan dan perikanan secara berkelanjutan;
- 4) Meningkatkan pengolahan sumberdaya alam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk menunjang pariwisata bahari yang berkelanjutan;
- 5) Mengembangkan kawasan konservasi perairan untuk mendukung perikanan berkelanjutan pariwisata bahari dan kelestarian lingkungan;
- 6) Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang peningkatan produksi perikanan;
- 7) Meningkatkan SDM sektor kelautan dan perikanan;

- 8) Menciptakan birokrasi yang professional, adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi bebas dan bersih KKN di sektor kelautan dan perikanan;

b. Sasaran

Sasaran pembangunan kelautan dan perikanan adalah:

- 1) Menciptakan kemandirian dan stabilitas usaha kelautan dan perikanan, yang meliputi:
 - ❖ Meningkatnya ketersediaan aksesibilitas, kualitas dan keamanan produk perikanan;
 - ❖ Meningkatnya kinerja industri dan perdagangan sektor kelautan dan perikanan;
 - ❖ Meningkatnya iklim investasi dan usaha yang kondusif serta kesempatan kerja yang merata di sektor kelautan dan perikanan.
- 2) Menciptakan masyarakat perikanan yang berkeadilan social, yang meliputi:
 - ❖ Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan kelautan dan perikanan;
 - ❖ Meningkatnya ketersediaan dan akses terhadap layanan sektor perikanan dan kelautan;
- 3) Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil serta pemanfaatan sumber daya alam kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, yang meliputi: Tersedianya lingkungan perairan yang mampu mendukung pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal;
- 4) Mengembangkan kawasan konservasi perairan untuk mendukung perikanan berkelanjutan pariwisata bahari dan kelestarian lingkungan, yang meliputi: meningkatnya efektifitas pengelolaan kawasan konservasi perairan;
- 5) Meningkatkan pengolahan sumberdaya alam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk menunjang pariwisata bahari yang berkelanjutan, yang meliputi: tersedianya sumber daya alam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menunjang pariwisata bahari yang berkelanjutan;
- 6) Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang peningkatan produksi perikanan yang meliputi: meningkatnya sarana dan prasarana produksi perikanan;

- 7) Meningkatkan SDM sektor kelautan dan perikanan yang meliputi:
 - ❖ Meningkatnya kualitas SDM aparatur sektor kelautan dan perikanan;
 - ❖ Meningkatnya kualitas SDM pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan.
- 8) Menciptakan birokrasi yang professional, adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi bebas dan bersih KKN di sektor kelautan dan perikanan, yang meliputi: meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan system pelayanan publik sektor kelautan dan perikanan yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan partisipatif.

B. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan, maka Program dan Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Kegiatan dari Program ini meliputi :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Kegiatan dari Program ini meliputi :

- a. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas ;
- b. Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi;
- c. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

3. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Kegiatan dari Program ini meliputi :

- a. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil;
- b. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;

- c. Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT;
- d. Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- e. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi.

4. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

- a. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- b. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut.

5. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil

6. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

- a. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
- b. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, maka Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR KINERJA	FORMULA INDIKATOR
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Share PDRB sub sektor perikanan dan kelautan terhadap PDRB sektor pertanian (%)	Sumber data BPS
2	Presentase PAD kelautan dan perikanan terhadap pendapatan daerah	$\frac{\text{Total PAD PD}}{\text{Total PAD Provinsi}} \times 100$
3	Ketersediaan protein hewani berbasis olahan perikanan	Kg/Kapita/Tahun
4	Nilai Tukar Nelayan (NTN) sektor perikanan	Sumber data BPS
5	Nilai Tukar Pembudidya (NTP) sektor perikanan	Sumber data BPS
6	Ketersediaan produk olahan perikanan di Pariwisata Estate	Jumlah Jenis Produk Olahan

D. PERJANJIAN KINERJA

1. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2021	2022	
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kontribusi kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Share PDRB sub sektor perikanan dan kelautan terhadap PDRB sektor pertanian (%)	4,18 %	4,24%*	Sumber data BPS
2	Meningkatnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	Presentase PAD kelautan dan perikanan terhadap pendapatan daerah	0,47%	0,99%	$\frac{\text{Total PAD PD}}{\text{Total PAD Provinsi}} \times 100$
3	Meningkatnya status pangan perikanan	Ketersediaan protein hewani berbasis olahan perikanan (AKI)	46	50	Kg/Kapita/Tahun
4	Meningkatnya daya saing sub sektor perikanan dan kelautan	Nilai Tukar Nelayan (NTN) sektor perikanan	92,55	100	Sumber data BPS
		Nilai Tukar Pembudidya (NTP) sektor perikanan	92,24	100	Sumber data BPS
5	Terwujudnya pemenuhan unsur 5A pariwisata dari sektor kelautan dan perikanan	Ketersediaan produk olahan perikanan di Pariwisata Estate	10	12	Jumlah Jenis Produk Olahan

2. Pelaksanaan Anggaran

1)	APBD PERUBAHAN			Anggaran	Keterangan
	a) Belanja (program)	Rp.	49.453.248.701	Realisasi minimal 85%	
	1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.	17.478.304.321	Realisasi minimal 90%	
	2. Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Rp.	220.399.900	Realisasi minimal 85%	
	3. Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp.	22.482.994.200	Realisasi minimal 85%	
	4. Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp.	4.446.803.900	Realisasi minimal 85%	
	5. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp.	163.360.100	Realisasi minimal 85%	
	6. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp.	596.282.600	Realisasi minimal 85%	
	b) Pendapatan	Rp.	18.922.100.000	Realisasi minimal 90%	
2)	APBN				Keterangan
	Program (Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan)				
	a) Dekosentrasi	Rp.	2.159.354.000	Realisasi minimal 90%	
	- Dukungan Manajemen (DK-Satker 01)	Rp.	232.020.000	Realisasi minimal 90%	
	- Pengelolaan Perikanan dan Kelautan (DK-Satker 03)	Rp.	605.407.000	Realisasi minimal 90%	
	- Pengelolaan Perikanan dan Kelautan (DK-Satker 04)	Rp.	359.995.000	Realisasi minimal 90%	
	- Pengelolaan Perikanan dan Kelautan (DK-Satker 05)	Rp.	167.935.000	Realisasi minimal 90%	
	- Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (DK-Satker 06)	Rp.	381.950.000	Realisasi minimal 90%	
	- Kualitas Lingkungan Hidup (DK-Satker 07)	Rp.	412.047.000	Realisasi minimal 90%	
	b) Tugas Pembantuan	Rp.	1.780.831.000	Realisasi minimal 90%	
	- Pengelolaan Perikanan dan Kelautan (TP-Satker 03)	Rp.	1.780.831.000	Realisasi minimal 90%	
	Jumlah Dekonsentrasi + Tugas Pembantuan			Rp.	3.940.185.000
					Realisasi minimal 90%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kualitatif dan kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja kegiatan dikategorikan dalam kelompok :

a. *Masukan (Inputs)*

Segala sesuatu yang diperlukan sehingga pelaksanaan kegiatan dan program dapat terlaksana.

b. *Keluaran (Outputs)*

Segala sesuatu yang berupa produk/jasa sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.

c. *Hasil (Outcomes)*

Adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.

d. *Manfaat (Benefits)*

Kegunaan suatu keluaran yang dirasakan oleh masyarakat.

e. *Dampak (Impact)*

Ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang diawali oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Dalam menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur didukung oleh Perangkat Daerah untuk melaksanakan pelayanan kepada publik maupun aparatur sebagai upaya mengimplementasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra.

Untuk mengukur capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra dan Penetapan Kinerja maka dilakukan pengukuran capaian kinerja dan metode yang digunakan adalah pengukuran kinerja.

2. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan metode Penyimpulan Capaian Sasaran dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran *ordinal* sebagai berikut :

- $X \geq 85 \%$: Sangat Berhasil
- $70 \% \leq X < 85 \%$: Berhasil
- $55 \% < X < 70 \%$: Cukup Berhasil
- $X \leq 55 \%$: Belum Berhasil

Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan dalam kurun waktu tahun 2022 telah berdampak signifikan bagi kemajuan dan perkembangan sektor kelautan dan perikanan. Adapun capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan antara lain sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	REALISASI	FORMULA INDIKATOR
			2021	2022	
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kontribusi kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Share PDRB sub sektor perikanan dan kelautan terhadap PDRB sektor pertanian (%)	4,18 %	4,24 %*	Sumber data BPS
2	Meningkatnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	Presentase PAD kelautan dan perikanan terhadap pendapatan daerah	0,47%	0,99%	$\frac{\text{Total PAD PD}}{\text{Total PAD Provinsi}} \times 100$
3	Meningkatnya status pangan perikanan	Ketersediaan protein hewani berbasis olahan perikanan	46	48,50	Kg/Kapita/Tahun
4	Meningkatnya daya saing sub sektor perikanan dan kelautan	Nilai Tukar Nelayan (NTN) sektor perikanan	92,55	100	Sumber data BPS
		Nilai Tukar Pembudidya (NTP) sektor perikanan	92,24	93	Sumber data BPS
5	Terwujudnya pemenuhan unsur 5A pariwisata dari sektor kelautan dan perikanan	Ketersediaan produk olahan perikanan di Pariwisata Estate	10	12	Jumlah Jenis Produk Olahan

Ket : * Data sementara triwulan III

Dari tabel diatas dapat diuraikan capaian indikator-indikator kinerja sasaran dimaksud sebagai berikut :

Uraian capaian kinerja dari masing – masing sasaran strategis dan indikator – indikator kinerja dijabarkan sebagai berikut :

Sasaran strategis 1 : Meningkatnya Kontribusi Kelautan dan Perikanan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Sasaran strategi 1 (satu) dengan IKU “Share PDRB sub sektor perikanan dan kelautan terhadap PDRB sektor pertanian”. Pada triwulan III tahun 2022 Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bidang kelautan dan perikanan bersama sektor pertanian dan sektor kehutanan memberikan sumbangsih pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 4,24% dibandingkan dengan triwulan III tahun 2021 dengan total kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 29,27%. Capaian Kinerja Kelautan dan Perikanan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Capaian Kinerja PDRB

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2021	2022		Capaian (%)
				Target	Realisasi	
1.	Kontribusi Kelautan dan Perikanan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	%	4,18	4,18	4,24	101,44

Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi NTT

Sasaran strategis 2 “Persentasi Peningkatan PAD Dinas Kelautan dan Perikanan Terhadap PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur”

Indikator Kinerja Utama (IKU) pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Kelautan dan Perikanan adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah Nomor Tahun 2020. Capaian kinerja indikator Pendapatan asli Daerah (PAD) Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar Rp. 7.507.588.232,05 (39,68 %) dari target Rp. 18.922.100.000,00. Apabila dibandingkan dengan tahun 2021 PAD dinas kelautan dan Perikanan mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.757.449.594,60 (30,56%) dari PAD tahun 2021 yakni sebesar Rp. 5.750.138.637,45. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya terobosan dalam penarikan PAD di cabang dinas dengan melakukan penarikan retribusi secara langsung ke pelaku usaha. Sedangkan target PAD Dinas Kelautan dan Perikanan tidak mencapai target di karenakan target PAD yang dibebankan

terlampau besar. Capaian Kinerja PAD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Peningkatan PAD

Dinas Kelautan dan Perikanan T.A.2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2021	2022		Capaian (%)
				Target	Realisasi	
1.	Prosentasi Peningkatan PAD Dinas Kelautan dan Perikanan Terhadap PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Rp	5.750.138.673	18.922100.000	7.507.588.232	39,68

Tabel 3.3. Capaian Indikator Kinerja Prosentasi Peningkatan PAD

Dinas Kelautan dan Perikanan Terhadap PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2021	2022		Capaian (%)
				Target	Realisasi	
1.	Prosentasi Peningkatan PAD Dinas Kelautan dan Perikanan Terhadap PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur	%	0,44	0,99	0,55	55,56

Sasaran strategis 3 “Kinerja Ketersediaan protein hewani berbasis olahan perikanan”

Sasaran strategis Kinerja Ketersediaan protein hewani berbasis olahan perikanan dengan indikator kinerja ketersediaan protein hewani. Untuk memenuhi ketersediaan pangan ikan ini, diperoleh melalui usaha perikanan perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Capaian indikator ketersediaan protein hewani dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.4. Capaian Indikator Kinerja Ketersediaan protein hewani
Berbasis olahan perikanan**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2021	2022		Capaian (%)
				Target	Realisasi	
1.	Kinerja Ketersediaan protein hewani berbasis olahan perikanan (AKI)	Kg/Kapita /Tahun	46	50	48,50	97

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mendukung pencapaian ketersediaan produksi hewani berbasis olahan melalui program Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan yaitu :

- ❖ Bantuan coolbox 100 liter, coolbox 100 liter dan coolbox berinsulasi.
- ❖ Safari GEMARIKAN di 2 (dua) Kota/Kabupaten yaitu Kota Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan

Sasaran strategis 4 “Menigkatnya daya saing sub sektor perikanan dan kelautan”

Sasaran strategis meningkatnya daya saing sub sektor perikanan dan kelautan memiliki 2 indikator yaitu:

1. Nilai Tukar Nelayan (NTN) sektor perikanan

Nilai tukar nelayan adalah rasio antara indeks harga yang diterima nelayan dengan indeks harga yang dibayar nelayan. NTN digunakan untuk mengukur kemampuan/daya beli nelayan dan dapat menunjukkan daya tukar produk perikanan dengan harga dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi.

Tabel 3.5. Capaian Indikator Kinerja Nilai Tukar Nelayan (NTN) sektor perikanan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2021	2022		Capaian
				Target	Realisasi	
1.	Nilai Tukar Nelayan (NTN) sektor perikanan	%	92,55	93	94	100

Nilai tukar nelayan pada tahun 2022 sebesar 94 mengalami kenaikan sebesar 1,45 % dari tahun 2021 yaitu 92,55 hal ini dikarenakan makin meningkatnya daya beli dari nelayan. salah satu program dinas kelautan dan perikanan provinsi nusa tenggara timur dalam mendukung

pencapaian nilai tukar nelayan dilakukan dengan melakukan intervensi program perikanan tangkap dengan kegiatan – kegiatan berupa :

- ❖ Pembangunan prasarana pelabuhan dan dermaga perikanan PPI Waingapu di Sumba Timur;
- ❖ Pengembangan sarana prasarana dan operasional penunjang di PPI Oeba dan PPP Tenau;
- ❖ Pengadaan kapal 3 GT, 1 GT beserta alat tangkap (*gillnet*) dan ketinting serta coolbox.

2. Nilai Tukar Pembudidaya (NTP) sektor perikanan

Nilai Tukar Pembudidaya (NTP) merupakan alat ukur kesejahteraan pembudidaya yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima oleh pembudidaya dengan harga yang dibayarkan oleh pembudidaya. Angka capaian NTPi diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan dilaporkan secara berkala setiap bulannya.

Tabel 3.6. Capaian Indikator Kinerja Nilai Tukar Pembudidaya (NTP) sektor perikanan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2021	2022		Capaian %
				Target	Realisasi	
1.	Capaian Indikator Kinerja Nilai Tukar Pembudidaya (NTP) sektor perikanan	%	92,24	100	103	100

Nilai tukar Pembudidaya pada tahun 2022 sebesar 103 mengalami kenaikan sebesar 10,56 % dari tahun 2021 yaitu 92,24 hal ini dikarenakan makin meningkatnya nilai penjualan rumput laut yang merupakan salah satu dampak dikeluarkannya perub 36 tahun 2022 tentang tata niaga hasil perikanan.

Salah satu program dinas kelautan dan perikanan provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mendukung pencapaian nilai tukar pembudidaya dilakukan dengan melakukan intervensi program perikanan budidaya dengan kegiatan – kegiatan berupa :

- ❖ Kampung budidaya di Semau di Kabupaten Kupang;
- ❖ Bantuan sarana prasarana budidaya Lele/Nila sistem bioflok di 4 (empat) Kabupaten;
- ❖ Bantuan bahan baku pembuatan pakan ikan di 7 (tujuh) Kabupaten;
- ❖ Pengembangan budidaya Rumput Laut (dampak inflasi) di 3 (tiga) Kabupaten.

Sasaran strategis 5 “Terwujudnya pemenuhan unsur 5A pariwisata dari sektor kelautan dan perikanan”

Dengan indikator utamanya yaitu Ketersediaan produk olahan perikanan di Pariwisata Estate, capaian indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7. Capaian Indikator Kinerja Ketersediaan produk olahan perikanan di Pariwisata Estate

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2021	2022		Capaian %
				Target	Realisasi	
1.	Capaian Indikator Kinerja Ketersediaan produk olahan perikanan di Pariwisata Estate	%	100	12	12	100

Capaian indikator kinerja ketersediaan produk olahan perikanan tahun 2022 sebesar 100% atau sebanyak 12 produk olahan ikan. Produk olahan ikan yang di maksud yaitu : Loin Tuna, Tuna Beku, Ikan Kering, Nugget Ikan, Kaki Naga, Abon Ikan, Bakso Ikan, Se'i Ikan, Otak-Otak, Es rumput Laut, Dodol Rumput Laut dan Stik Rumput Laut.

Upaya yang dilakukan oleh dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mendukung pencapaian ketersediaan produk olahan perikanan di Pariwisata Estate dengan program Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan yaitu :

- ❖ Bantuan coolbox 100 liter, coolbox 100 liter dan coolbox berinsulasi.
- ❖ Safari GEMARIKAN di 2 (dua) Kota/Kabupaten yaitu Kota Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan

Program/kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur ialah program kerja eselon III yang di uraikan dalam tabel Indikator Program Eselon III berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET/ OUTPUT	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Potensi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Yang Menunjang Wisata Bahari	Cakupan Luas Kawasan	94%	103,78%
	Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Lingkungan Perairan Secara Berkelanjutan	Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola		
2.	Meningkatnya Produktifitas Kapal Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi	6%	3,90%
	Restrukturisasi Armada Penangkapan Ikan	Perikanan Tangkap		
3	Peningkatan Kesejahteraan Nelayan dan Petani / pembudidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	10%	1,39%
4	Tersedianya Lingkungan Perairan Yang Bebas IUUFishing Untuk Perikanan Berkelanjutan	Penurunan Kasus IUUFishing (<i>Illegal, Unregulation, Unreport Fishing</i>)	20%	18,18%
5	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan (AKI)	Persentasi Peningkatan Angka Konsumsi Ikan	9%	5,62%

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pelaksanaan Program/Kegiatan yang mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur di gambarkan dalam tabel berikut :

No	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran Murni	Refocusing/ Perubahan
1	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3,251,726,600	2,584,267,800
2	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	3,005,821,400	2,509,448,800

3	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	151,852,100	27,661,500
4	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	94,053,100	47,157,500
5	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	22,955,923,300	22,544,326,600
6	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	3,350,500,000	3,274,773,900
7	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	276,366,700	92,143,000
8	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Daerah Provinsi Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)	95,982,200	16,005,800
9	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	19,233,074,400	19,161,403,900
10	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	4,518,916,800	4,446,803,900
11	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi	24,999,100	2,970,100
12	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	4,493,917,700	4,443,833,800
13	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1,184,158,200	432,021,050
14	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1,184,158,200	432,021,050
15	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	5,549,499,400	596,282,600
16	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	5,549,499,400	596,282,600

Penjabaran Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan yang mendukung indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan antara lain sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Ruang Laut dan Pulau-Pulau Kecil

Program Pengelolaan Ruang Laut dan Pulau-Pulau Kecil dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.584.267.800,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2375647116,- atau 91,93%. Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

a. Penyusunan Dokumen Final Materi Teknis RZWP3K NTT

Berlakunya Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Provinsi untuk mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari 0-12 mil sebagai salah satu arahan sehingga Pemerintah Provinsi NTT menyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang didalamnya juga mengatur Kawasan Konservasi, Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Strategis Nasional tertentu dan Alur pelayaran. Besaran pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 204.952.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 67.756.400,- (33,05%) hal ini yang disebabkan karena pada saat pencairan anggaran pagu anggaran terblokir sehingga hanya bisa mencairkan anggaran kegiatan sebesar 33,05%. Kegiatan ini melibatkan Kelompok kerja penyusunan Materi Teknis RZWP3K NTT pada semua instansi, diantaranya: BKKPN, BBKSDA, BPSPL Denpasar, PUPR Provinsi, Disperindag Provinsi, Biro Hukum, Biro Pemerintahan, Bappelitbangda, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, ESDM, Dinas Perhubungan, Disparekraf, LHK, WWF, YKAN. Kegiatan ini menghasilkan keluaran adanya Kesepakatan Perencanaan Pemanfaatan dan Pengelolaan Perairan Pesisir Tingkat Daerah, Kesepakatan Perencanaan Pemanfaatan dan Pengelolaan Perairan Pesisir TK Pusat dengan hasil akhir tersusunnya Dokumen Final Materi Teknis RZWP3K NTT;

b. Rehabilitasi WP3K

Kegiatan rehabilitasi mangrove merupakan bentuk tugas dan tanggung jawab pemulihan ekosistem mangrove yang berlokasi di Kabupaten Sumba Timur dengan sasaran masyarakat pesisir. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya anakan Mangrove (2.600 anakan) dan tersedianya SDM yang Bersertifikasi. Kegiatan ini tidak terealisasi dikarenakan terjadi refocusing anggaran di Tahun 2022 sehingga sampai dengan akhir tahun kegiatan ini hanya terealisasi sebesar Rp. 347.200,- berupa belanja Alat Tulis Kantor (ATK).

c. Penerbitan KKPRL

Dengan diterbitkannya UU no 11/2020 tentang Cipta Kerja dan arahan PP 21/2021 serta KEPMEN KP 28/2021 yang menjelaskan bahwa untuk pemanfaatan ruang laut dilaksanakan melalui persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dalam menerbitkan Konfirmasi Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) yang selanjutnya dilakukan perizinan berusaha/Nonberusaha berbasis resiko sebagaimana amanah PP 05/2021 tentang perizinan berusaha berbasis resiko. Sehingga Pemerintah Provinsi melaksanakan verifikasi lapangan dalam menetapkan keterangan dan informasi pemanfaatan Ruang Laut dan mendapat pendelegasian kewenangan MKP kepada provinsi terkait penerbitan PKKPRL dan perizinan berusaha dan nonberusaha. Besaran anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 15.089.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 14.220.100,- (94%) yang berlokasi di Manggarai Barat dengan output kegiatan adalah Rekomendasi Perizinan Laut/Persetujuan KPPRL/Keterangan Pemanfaatan Ruang Laut yang diterbitkan. Output dari kegiatan ini tersedianya dokumen perizinan laut berupa keterangan pemanfaatan ruang laut yang diterbitkan. Selama Tahun 2022 rekomendasi informasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut Dinas Kelautan dan Perikanan sebanyak 13 rekomendasi.

d. Pembentukan kelompok yang dibentuk dengan SK

Penguatan kelembagaan kelompok berdasarkan Surat Keputusan yang diikuti oleh Kelompok Masyarakat di Kabupaten Flores Timur, output dari kegiatan ini adalah adanya pembentukan kelompok yang dibentuk dengan SK. Pada Tahun 2022 ini kegiatan ini tidak terealisasi disebabkan karena adanya refocusing.

Selain melaksanakan kegiatan yang menggunakan dana yang bersumber dari APBD, bidang Pengelolaan Ruang Laut (PRL) juga melakukan kegiatan yang bersumber dari APBN, adapun rincian kegiatan yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

a. Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut dengan pagu anggaran sebesar Rp. 177.068.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 150.229.000,- atau realisasi 84,84% yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan :

❖ Usulan Penetapan Kawasan Konservasi;

Dengan kegiatan menyusun dokumen final rencana zonasi kawasan konservasi yang telah mendapatkan masukan dari konsultasi publik dengan hasil kegiatan adalah terlaksananya sosialisasi awal pembentukan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Pulau Ende, Nagekeo dan Laut sekitarnya. Selama Tahun 2022, kegiatan ini tidak terealisasi disebabkan karena adanya refocusing.

❖ Inisiasi Jejaring dan Kemitraan;

Salah satu bentuk pengelolaan yang berpeluang meningkatkan unjuk kerja Kawasan Konservasi adalah pengelolaan berbasis kemitraan (co-management) sebagaimana yang dimandatkan dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan. Terakomodirnya permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pengawasan konservasi perairan serta memperkuat komitmen kemitraan antara Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) dengan para mitra terkait pengelolaan kawasan perairan di Nusa Tenggara Timur.

❖ Peningkatan Kompetensi SDM Pengelola Kawasan Konservasi

Kapasitas kompetensi sumber daya manusia pengelola kawasan konservasi perlu ditingkatkan seiring dengan peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya perjalanan dalam rangka kegiatan rakortek pengelolaan kawasan konservasi.

b. Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang

Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 99.800.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 95.265.000,- atau 95% dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

❖ Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang

Implementasi KKPRL diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan KKPRL dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut. Sehubungan ditetapkan peraturan tersebut maka diperlukan sosialisasi pada pelaku usaha dan pemangku kepentingan terkait. Output dari kegiatan ini adalah terselenggaranya sosialisasi penyelenggaraan tata ruang di perairan Nusa Tenggara Timur.

❖ Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang menetap saat ini belum sepenuhnya tercatat, terdaftar dan/atau memiliki legalitas perizinan. Kegiatan Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut dimaksudkan untuk mengidentifikasi, mencatat, dan mengadministrasikan kegiatan yang memanfaatkan ruang laut secara menetap oleh Perorangan, Badan Usaha, Pemerintah/Pemerintah Daerah atau Masyarakat Lokal/Masyarakat Tradisional. Secara singkatnya kegiatan pendataan kegiatan eksisting merupakan kegiatan pemanfaatan yang ada saat ini serta dapat dilengkapi dengan data

perizinannya. Output dari kegiatan ini teridentifikasinya kegiatan pemanfaatan ruang laut.

c. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut

Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 135.179.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 134.579.000,- atau 99,55% dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

❖ Layanan data dan informasi

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan, dipandang perlu dilaksanakan koordinasi antara Pusat dan Daerah dalam bentuk Validasi Data Bidang Pengelolaan Ruang Laut untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya data garam bidang pengelolaan ruang laut.

❖ Layanan perencanaan dan penganggaran

Kegiatan ini meliputi kegiatan pemantauan program dan penganggaran agar semua kegiatan sesuai dengan yang diharapkan. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya perencanaan dan penganggaran lingkup Dirjen Pengelolaan Ruang Laut.

❖ Layanan Pemantauan dan Evaluasi

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan merupakan salah satu bagian dari unsur pengendalian/kontrol dalam pelaksanaan setiap program/kegiatan Ditjen PRL yang dilaksanakan dari rencana yang telah ditetapkan. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Dirjen Pengelolaan Ruang Laut.

❖ Layanan Manajemen Keuangan

Sesuai PMK Nomor 248/PMK.07/2010 menyatakan bahwa setiap satker/Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Dekonsentrasi diwajibkan menyampaikan laporan keuangan meliputi Arsip Data Komputer (ADK), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan neraca ke Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang (UAPPA/B) E1 di setiap bulannya. Terlaksananya kegiatan penyusunan laporan keuangan dan barang untuk mendukung kelancaran administrasi lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut.

Kegiatan strategis Bidang Ruang Laut antara lain sebagai berikut:

- a. Sarana dan Prasarana Pusat Informasi Kawasan Konservasi
Berupa pondok informasi kawasan konservasi daerah dan papan informasi (videotron) yang memberikan informasi tentang kawasan konservasi, tempat pendidikan bagi pengunjung dan tempat berlindung/istirahat bagi petugas/pengunjung yang berlokasi di KKPD Selat Pantar dengan total anggaran Rp. 129.800.000,- realisasi sebesar 100% menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK).
- b. Sarana monitoring biofisik target konservasi
Berupa peralatan selam, kamera bawah air dan drone yang berlokasi di KKPD Selat pantar dengan total anggaran sebesar Rp. 262.195.875,- atau realisasi 100% menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK).
- c. Speedboat kawasan konservasi
Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.406.000.000,- atau realisasi 100% dengan menggunakan dana Alokasi Khusus (DAK).

2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Pengelolaan Perikanan Tangkap, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 22.544.326.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 21.418.060.866,- atau 95% dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a. Penerbitan Izin Rekomendasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai 30 GT dengan pagu sebesar Rp. 85.463.370,- atau terealisasi sebesar 100% dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Operasional Pelayanan Perizinan Perikanan Tangkap, yang meliputi:

- ❖ Penerbitkan Rekomendasi SIUP, SIPI, SIKPI, dan Izin SIPI Andon, TDKP Andon dan Cetak Blanko Izin dan Penggunaan Internet.

Kegiatan ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 13.626.300,- dan terealisasi sebesar 100% dengan Output terlaksananya penerbitan rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), dan Izin Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP), Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP), Andon, Surat Tanda Keterangan Andon (STKA) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Andon.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur mengeluarkan sebanyak 1.247 (seribu dua ratus empat puluh tujuh) yang terdiri dari 430 (empat

ratus tiga puluh) rekomendasi izin dan 817 (delapan ratus tujuh belas) izin. Adapun uraian rekomendasi izin dan izin dapat diuraikan sebagai berikut:

- Rekomendasi Izin:
 - SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) sebanyak 40 (empat puluh) rekomendasi izin;
 - SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) sebanyak 380 (tiga ratus delapan puluh) rekomendasi izin;
 - SIKPI (Surat izin Kapal Pengangkut Ikan) sebanyak 10 (sepuluh) rekomendasi izin.
- Sedangkan Izin terdiri dari:
 - Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP) Lokal sebanyak 705 (tujuh ratus lima) Izin;
 - Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP) Andon sebanyak 4 (empat) Izin;
 - Surat Tanda Keterangan Andon (STKA) sebanyak 9 (sembilan) Izin;
 - SIPI ANDON (kapal dari luar daerah NTT yang datang mencari ikan di daerah NTT) sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) Izin.

❖ Sosialisasi Pelayanan Perizinan Perikanan Tangkap

Besaran anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 38.462.300,- dengan realisasi anggaran sebesar 100% dengan output Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Pelayanan Perizinan Perikanan tangkap secara during dan luring. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan di Hotel Kristal Kupang dengan melibatkan peserta dari DKP Prov. NTT 7 (tujuh) KCD, Pelaku Usaha, Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kupang, Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI).

❖ Cek Fisik kapal dan Monitoring Perizinan

Pagu anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 33.374.770,- dengan realisasi anggaran sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Cek Fisik kapal dan Monitoring Perizinan yang dilaksanakan di Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. TTU, Rote Ndao, Flotim dengan melibatkan Petugas Cek Fisik Kapal dan Staf Bidang Perikanan Tangkap.

- Melakukan Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Perizinan Perikanan Tangkap

Kegiatan ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 38.462.300,- dengan output terlaksananya kegiatan Sosialisasi Pelayanan Perizinan Perikanan tangkap secara Daring dan Luring

- Melakukan Cek Fisik kapal dan Monitoring Perizinan

Kegiatan ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 33.374.770,- dengan output terlaksananya kegiatan Cek Fisik kapal dan Monitoring Perizinan.

2) Pengelolaan Penangkapan Ikan di wilayah Laut sampai dengan 12 mil

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 3.350.500.000,- atau terealisasi sebesar 100%.

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya prasarana usaha perikanan tangkap. Rincian kegiatan tersebut sebagai berikut:

❖ Prasarana Usaha Perikanan Tangkap (Pokir);

Kegiatan ini berisi pengadaan kapal perikanan ukuran 3 GT sebanyak 3 (tiga) unit untuk 3 (tiga) Kabupaten, perahu motor ketinting sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit untuk 10 (sepuluh) kabupaten, kapal perikanan ukuran 1 GT sebanyak 14 (empat belas) unit untuk 8 (delapan) kabupaten, alat tangkap gillnet sebanyak 47 (empat puluh tujuh) pcs untuk 5 (lima) kabupaten, coolbox sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) unit untuk 16 (enam belas) kabupaten dan sampan sebanyak 10 (sepuluh) unit untuk 1 (satu) kabupaten. Kegiatan ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 3.495.750.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.490.872.500 (100%).

3) Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pelabuhan Perikanan Provinsi (DAK)

Kegiatan ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 19.233.074.400,- dan terealisasi sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan, kegiatan ini berlokasi antara lain di:

❖ PP Waingapu berupa:

- Dermaga PP Waingapu 1 (satu) paket dengan anggaran sebesar Rp. 2.850.000.000,- yang terealisasi sebesar 100%.
- Kolam pelabuhan PP Waingapu dengan anggaran sebesar Rp. 3.030.000.000,- yang terealisasi sebesar 100%.

❖ PPP Tenau berupa:

- Dermaga PP Tenau 1 (satu) paket dengan anggaran sebesar Rp. 2.265.000.000,- yang terealisasi sebesar 100%.

- Jaringan dan Instalasi listrik (termasuk trafo) dengan anggaran sebesar Rp. 615.000.000,- yang terealisasi sebesar 100%.
 - Sarana operasional kesyahbandaran dan keselamatan pelayaran berupa alat navigasi pelayaran dan komunikasi yang terdiri dari tiang dan lampu navigasi (merah dan hijau), teropong binocular, GPS dan teropong monocular dengan besaran anggaran Rp. 200.000.000,- yang terealisasi sebesar 100%.
- ❖ PPI Oeba
- Penahan Gelombang (*breakwater*) dengan anggaran sebesar Rp. 6.600.000.000,- yang terealisasi sebesar 100%.
 - Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Hiegienis dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- yang terealisasi sebesar 100%.
 - Kolam pelabuhan PPI Oeba dengan anggaran sebesar Rp. 2.365.000.000,- yang terealisasi sebesar 100%.

Selain melaksanakan kegiatan yang menggunakan dana yang bersumber dari APBD, bidang Perikanan Tangkap juga melakukan kegiatan yang bersumber dari APBN, adapun rincian kegiatan yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah yang difasilitasi dan Dibina Penerbitan Dokumen Kapal Perikanannya
Kegiatan ini mengalokasikan pagu anggaran sebesar Rp. 6.900.000,- dengan realisasi sebesar 100%. Kegiatan ini berupa pendaftaran dan penandaan kapal perikanan yang menjadi kewenangan daerah dengan hasil kegiatan terdatanya 100 (seratus) anggota pokmaswas aktif yang tersebar di 7 (tujuh) Cabang Dinas.
- b. Intergrasi Sistem Perizinan Daerah ke dalam Sistem Perizinan Pusat-Daerah Kegiatan ini meliputi:

- ❖ Sosialisasi Perijinan Pelaku Usaha Perikanan Tangkap
Pagu anggaran sebesar Rp. 120.917.900,- dengan output terlaksananya Sosialisasi Perijinan Pelaku Usaha Perikanan Tangkap sebanyak 20 (dua puluh) orang pelaku usaha.
- ❖ Pelatihan SIMKADA

Pagu anggaran sebesar Rp. 21.486.000,- dengan output terlaksananya Pelatihan SIMKADA Petugas Kabupaten/Kota di 7 (tujuh) Kantor Cabang Dinas (KCD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- ❖ Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Identifikasi CPCL Kegiatan Fasilitas SEHAT Nelayan

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 22.300.000,- untuk masyarakat pesisir di Kota Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Manggarai Barat. Berdasarkan hasil identifikasi Calon Peserta Calon Lokasi (CPCL) Sertifikat Tanah (SEHAT) Nelayan Tahun 2022 didapat Output dari kegiatan ini adalah teridentifikasi 60 (enam puluh) Calon Penerima Sertifikasi Nelayan.

- ❖ Sinergi, Koordinasi, Sosialisasi dan Identifikasi CPCL Kegiatan Fasilitas SEHAT Nelayan

Berdasarkan hasil identifikasi Calon Peserta Calon Lokasi (CPCL) Sertifikat Tanah (SEHAT) Nelayan Tahun 2022 dapat dilaporkan bahwa output dari kegiatan tersebut adalah teridentifikasinya kelompok dan verifikasi kegiatan SEHAT nelayan untuk Tahun Anggaran 2022 sebanyak 90 (sembilang puluh) Calon Penerima Sertifikasi Nelayan untuk masyarakat pesisir di Kota Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Manggarai Barat.

- ❖ Penguatan Kapasitas Kelembagaan Nelayan (KUB dan Koperasi Nelayan)

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 6.400.000,- dengan output

- ❖ Sosialisasi dan Identifikasi Nelayan Calon Penerima Bantuan Premi Asuransi Nelayan
Pagu anggaran sebesar Rp. 14.200.000,- dengan output terlaksananya kegiatan Identifikasi BPAN sebanyak 30 (tiga puluh) orang

- ❖ Kelompok Nelayan yang kampung Nelayannya yang akan difasilitasi

Pagu anggaran sebesar Rp. 9.000.000,- dengan output kegiatan teridentifikasinya Kelompok Nelayan yang kampung Nelayannya yang akan difasilitasi.

c. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap :

- ❖ Layanan Data Statistik Kelautan dan Perikanan

Kegiatan ini mengalokasikan pagu anggaran sebesar Rp. 262.600.000,- dengan realisasi sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan dan pengumpulan data statistik bidang perikanan tangkap. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut:

- Pembayaran honor statistik untuk validator dan enumerator di 22 Kabupaten/Kota.

Pembayaran Honor Statistik Perikanan Tangkap dengan mengakomodir petugas validator dan enumerator di provinsi dan 22 Kabupaten/kota. Pendataan perikanan tangkap di Tahun Anggaran 2022 diinput pada aplikasi Satu Data Pusdatin Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan jumlah petugas statistik (yang meliputi: validator dan enumerator) di semua Kabupaten/Kota. Output dari kegiatan tersebut adalah terlaksananya pembiayaan honor statistik perikanan tangkap sebanyak 44 (empat puluh empat) orang di 22 Kabupaten/Kota di wilayah NTT;

- Pertemuan validasi statistik perikanan tangkap di Hotel Naka Kupang yang menghadirkan seluruh petugas statistik di 22 Kabupaten/kota. Dalam pertemuan ini diberikan bimbingan teknis untuk penginputan data statistik perikanan tangkap. Output dari kegiatan ini adalah terselenggaranya kegiatan validasi data statistik perikanan tangkap lingkup Dirjen Perikanan Tangkap.

❖ **Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penanggaran**

Kegiatan ini mengalokasikan pagu anggaran sebesar Rp. 28.551.000,- dengan realisasi sebesar 100%. Output kegiatan ini Tersusunannya Dokumen Perencanaan dan Penanggaran.

❖ **Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pemantauan**

Kegiatan ini mengalokasikan pagu anggaran sebesar Rp. 12.500.000,- dengan realisasi sebesar 100%. Output kegiatan ini Tersusunannya Laporan Evaluasi dan Pemantauan.

❖ **Laporan Keuangan dan BMN**

Kegiatan ini mengalokasikan pagu anggaran sebesar Rp. 35.940.000,- dengan realisasi sebesar 100%. Output kegiatan ini Tersusunannya Laporan Keuangan dan BMN.

Kegiatan strategis Bidang Perikanan Tangkap selama Tahun 2022 antara lain sebagai berikut:

- a. Pembangunan PPI Waingapu di Sumba Timur

Pembangunan Dermaga dan Kolam pelabuhan PP Waingapu di Sumba Timur dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.811.630.000,- dan terealisasi sebesar 100% dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK);

b. Pembangunan/ rehabilitasi Penahan Gelombang (breakwater) di PPI Oeba

Digunakan untuk memecah gelombang dan mengendalikan abrasi yang menggerus garis pantai dan untuk menenangkan gelombang di pelabuhan sehingga proses sandar kapal lebih mudah dan cepat dengan pagu sebesar Rp. 2.295.551.000,- dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK).

c. Pembangunan jaringan instalasi listrik dan sarana operasional kesyahbandaran dan keselamatan kapal di PPP Tenau

Berupa alat navigasi pelayaran dan komunikasi yang terdiri dari tiang dan lampu navigasi (merah dan hijau), teropong binocular, GPS dan teropong monocular dengan pagu anggaran sebesar Rp. 611.590.000, - dan terealisasi sebesar 100% dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK).

d. Pengadaan Kapal 3 GT dan Ketinting

Pengadaan Kapal yang telah diakomodir oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Pokok Pikiran (Pokir) Dewan adalah pengadaan kapal perikanan ukuran 3 GT sebanyak 3 (tiga) unit untuk 3 (tiga) Kabupaten, perahu motor ketinting sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit untuk 10 (sepuluh) kabupaten, kapal perikanan ukuran 1 GT sebanyak 14 (empat belas) unit untuk 8 (delapan) kabupaten, alat tangkap gillnet sebanyak 47 (empat puluh tujuh) pcs untuk 5 (lima) kabupaten, coolbox sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) unit untuk 16 (enam belas) kabupaten dan sampan sebanyak 10 (sepuluh) unit untuk 1 (satu) kabupaten (Pokir).

3. Program Perikanan Budidaya

Program Perikanan Budidaya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.446.803.900,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.114.811.400,- atau 92.53%. Adapun kegiatan yang dilakukan menggunakan dana yang bersumber dari APBD antara lain:

a. Penunjang untuk Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan

Kegiatan ini didukung Pagu anggaran sebesar Rp. 24.999.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.970.100 atau sebesar 11,88% yang dipergunakan untuk pemenuhan Alat Tulis Kantor (ATK), sisa anggaran tidak dipakai karena telah dipotong (mengalami refocusing anggaran). Output dari

kegiatan ini adalah terlaksananya penunjang kegiatan penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan (Paket). Sepanjang Tahun 2022 Dinas Kelautan dan Perikanan tidak mengeluarkan rekomendasi perijinan usaha perikanan.

b. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut

Kegiatan ini didukung pagu sebesar Rp. 3.404.072.000,-, dengan realisasi Anggaran sebesar Rp. 3.404.072.000,- atau sebesar 100%. Lokasi kegiatan ini ada di instalasi (BBIP Tablolong, BBIS Noekele). Adapun kegiatan yang ada di BBIP Tablolong yang terdiri dari Sarana produksi pakan Alami (cacing sutera dan Maggot), Rehabilitasi Kolam atau Bak Pemijahan/Induk/Calon Induk/Pakan Alami/Tandon, Saluran Air Pasok (masuk) dan Buang (keluar). Sedangkan kegiatan yang ada di BBIS Noekele terdiri dari Penyediaan Calon Induk Unggul beserta Pakan Calon Induk Unggul, Belanja Natura dan Pakan-Natura-Penyediaan Calon Induk Unggul beserta Pakan Calon Induk Unggul, Rehabilitasi Bangunan Panti Benih/Bangsal/Hatchery BBIS Noekele, Rehabilitasi Kolam atau Bak Pemijahan/Induk/Calon Induk/Pakan Alami/Tandon BBIS Noekele, Rehabilitasi Kolam atau Bak Pengelolaan Limbah, Rehabilitasi Saluran Air Pasok (masuk) dan Buang (keluar). Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut.

Dalam rangka menanggulangi dampak inflasi di Kabupaten Kupang, Sabu Raijua dan Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022 perlu dilakukan kegiatan bantuan sosial sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang terdiri dari:

- ❖ Kabupaten Kupang sebanyak 4 (empat) kelompok;
- ❖ Kabupaten Sabu Raijua sebanyak 16 (enam belas) kelompok;
- ❖ Kabupaten Lembata sebanyak 10 (sepuluh) kelompok.

Selain melaksanakan kegiatan yang menggunakan dana yang bersumber dari APBD, bidang Perikanan Budidaya (PB) juga melakukan kegiatan yang bersumber dari APBN, adapun rincian kegiatan yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

a. Sampel Monitoring Penyakit Ikan Yang diuji

Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan pengujian kualitas air (pH, DO, Kecerahan, Suhu, Nitrat, Nitrit, Phosphat, Ammonia, dan Fe) dan pengujian penyakit ikan (parasit dan virus). Harapannya, dengan kegiatan monitoring ini dapat membantu para pembudidaya untuk deteksi dini penyakit sehingga dapat mencegah kematian massal ikan yang bisa mengakibatkan kerugian ekonomi dalam berbudidaya. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya analisa sebagai bahan

masukannya bagi para pembudidaya untuk perbaikan dan pencegahan munculnya hama penyakit pada ikan budidaya.

b. Unit Budidaya yang dibina penerapan Cara Budidaya Ikan yang baik (CBIB)

Kegiatan ini didukung Pagu anggaran sebesar Rp. 24.999.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.970.100 atau sebesar 11,88%. Kegiatan ini merupakan kegiatan pembinaan/bimtek Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) adalah cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, benih, pakan, obat ikan dan bahan kimia serta bahan biologis. Kegiatan ini diikuti oleh kelompok pembudidaya, verifikator dan penerapan CBIB. Output dari kegiatan ini adalah tercapainya jumlah pembudidaya yang tersertifikasi penerapan CBIB.

c. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut

Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 277.215.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 277.215.000,- atau 100% dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1) Layanan data dan informasi

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan, dipandang perlu dilaksanakan koordinasi antara Pusat dan Daerah dalam bentuk Validasi Data Bidang Perikanan Budidaya untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagikan melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya data budidaya bidang perikanan budidaya.

2) Layanan perencanaan dan penganggaran

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan merupakan salah satu bagian dari unsur pengendalian/kontrol dalam pelaksanaan setiap program/ kegiatan Ditjen Budidaya yang dilaksanakan dari rencana yang telah ditetapkan. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Dirjen Budidaya.

3) Layanan Manajemen Keuangan

Sesuai PMK Nomor 248/PMK.07/2010 menyatakan bahwa setiap satker/Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Dekonsentrasi diwajibkan menyampaikan laporan keuangan meliputi Arsip Data Komputer (ADK), Laporan Realisasi Anggaran (LRA),

dan neraca ke Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang (UAPPA/B) E1 di setiap bulannya. Terlaksananya kegiatan penyusunan laporan keuangan dan barang untuk mendukung kelancaran administrasi lingkup Ditjen Perikanan Budidaya.

4) Layanan Manajemen Keuangan

Sesuai PMK Nomor 248/PMK.07/2010 menyatakan bahwa setiap satker/Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Dekonsentrasi diwajibkan menyampaikan laporan keuangan meliputi Arsip Data Komputer (ADK), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan neraca ke Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang (UAPPA/B) E1 di setiap bulannya. Terlaksananya kegiatan penyusunan laporan keuangan dan barang untuk mendukung kelancaran administrasi lingkup Ditjen Perikanan Budidaya.

Kegiatan strategis bidang perikanan budidaya antara lain :

a. Kampung Budidaya di Semau

Jenis Ikan yang dibudidayakan adalah Ikan Kerapu dan Kakap yang diberikan untuk 20 (dua puluh) Kelompok yang tersebar di 4 (empat) Desa dengan Keanggotaan Masing-masing Kelompok sebanyak 10 (sepuluh) Orang. Bantuan yang diberikan berupa 2 (dua) Unit KJA Kotak 8 (delapan) Lubang ukuran 3x3 m dan 1 (satu) Unit KJA Bulat Diameter 6 m.

b. Bantuan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Lele/Nila System Bioflok

Peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan kawasan budidaya ikan lele system bioflok di 4 (empat) Kabupaten yaitu Kabupaten Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan, Belu dan Malaka menggunakan dana APBN

c. Bantuan Bahan Baku Pembuatan pakan

Berupa Tepung Ikan (sebanyak 500 kg), Bungkil Kedelai (sebanyak 500 kg), Vitamin Premiks (sebanyak 5 kg), dan Minyak Ikan (sebanyak 5 kg) sebanyak 9 kelompok di Kabupaten Kupang, Kabupaten Belu, Rote Ndao, Alor, Flores Timur dan Sikka menggunakan dana APBN.

d. Pengembangan Budidaya Rumput Laut

Pengembangan Budidaya Rumput Laut yang diwujudkan dengan pemberian bantuan berupa bantuan finansial sebanyak Rp. 270.000.000,- perkelompok Kabupaten Kupang, Kabupaten Sabu Raijua dan Kabupaten Lembata dengan sasaran 30 (tiga puluh) kelompok dan 226 (dua ratus dua puluh enam) orang menggunakan dana APBD.

e. Pengembangan Budidaya ikan di BBIS Noekele

Kegiatan di BBIS Noekele meliputi: Penyediaan calon induk unggul, belanja pakan, Rehabilitasi bangunan panti benih/bangsai/hatchery dan rehabilitasi kolam atau bak

pengelolaan limbah/saluran air dengan anggaran sebesar Rp. 149.900.000,- menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK).

f. Pengembangan Budidaya di BBIP Tablolong

Berupa sarana produksi pakan alami (cacing sutera dan Manggot), rehabilitasi kolam/bak pemijahan dan saluran air inlet dan outlet dengan anggaran sebesar Rp. 1.945.790.002,- menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK).

4. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 432.021.050,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 388.656.831,- atau 89,96%. Sepanjang tahun 2022 di Bidang PSDKP tidak banyak mendapatkan pagu anggaran untuk menunjang kegiatan dikarenakan anggaran terpotong/refocusing. Adapun kegiatan yang dilakukan menggunakan dana yang bersumber dari APBD antara lain :

- a. Pengawasan Pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil dengan kegiatan pagu anggaran sebesar Rp. 143.607.900,- dengan kegiatan Gelar Operasi Pengawasan Rutin yang dilakukan sebanyak 4 (empat) kali Gelar Operasi Pengawasan tahap 1, 2, 3 dan 4. Output kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di perairan Timor dan sekitarnya sehingga terdapat 43 (empat puluh tiga) gelar operasi dengan 21 (dua puluh satu) pelanggaran sehingga jumlah kapal yang tertib sebanyak 22 (dua puluh dua) kapal dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Gelar operasi pertama dilaksanakan selama 5 (lima) hari yaitu tanggal 21 - 25 Februari 2022 dengan waktu patroli 5 (lima) jam setiap hari sehingga total waktu pelaksanaan Patroli Tahap 1 adalah 25 (dua puluh) jam. Adapun lokasi kegiatan pengawasan dan pemantauan ini meliputi beberapa wilayah antara lain: Perairan selat Rote, perairan Pulau Kambing, perairan Laut Sawu, perairan Teluk Kupang, perairan Selat Semau dan sekitarnya. Sarana Kapal Pengawas yang digunakan dalam Patroli Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Di Perairan NTT ini adalah Kegiatan patroli menggunakan kapal pengawas Napoleon 054 yang merupakan kapal milik Stasiun PSDKP Kupang. Dalam kegiatan ini dilakukan pemeriksaan terhadap 8 (delapan) kapal perikanan dengan hasil 2 (dua) kapal perikanan yang melakukan pelanggaran yang tanpa dokumen yaitu SPB habis masa berlaku.
- 2) Gelar operasi kedua Gelar operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) tahap 2 (dua) Di Perairan NTT ini di laksanakan selama 5 (lima) hari, yaitu

terhitung dari tanggal 21 - 25 Maret 2022 dengan ketentuan 5 (lima) jam patroli setiap harinya (total waktu patroli 25 jam). Adapun lokasi kegiatan pengawasan dan pemantauan ini meliputi beberapa wilayah antara lain : Perairan Utara Flores Timur dan sekitarnya; perairan Adonara, Lembata dan sekitarnya; perairan Selatan Pulau Solor dan sekitarnya. Sarana Kapal Pengawas yang digunakan dalam Patroli Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Di Perairan NTT ini adalah Kegiatan patroli menggunakan kapal pengawas Napoleon 054 yang merupakan kapal milik Stasiun PSDKP Kupang. Dalam kegiatan ini dilakukan pemeriksaan terhadap 17 (tujuh belas) kapal perikanan dari hasil pemeriksaan tersebut semua kapal perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan tersebut tanpa dokumen yaitu : SPB habis masa berlaku, tanpa SPB, BPKP habis masa berlaku, SIPI habis masa berlaku dan tanpa SLO.

- 3) Gelar operasi pengawasan tahap 3 (tiga) Di Perairan NTT ini di laksanakan selama 5 (lima) hari, yaitu terhitung dari tanggal 15 - 18 November 2022 dengan ketentuan 4 (empat) jam patroli setiap harinya (total waktu patroli 25 jam). Adapun lokasi kegiatan pengawasan dan pemantauan ini meliputi beberapa wilayah antara lain: Perairan Rote Ndao dan Laut Sabu. Sarana Kapal Pengawas yang digunakan dalam Patroli Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Di Perairan NTT ini adalah Kegiatan patroli menggunakan kapal pengawas Napoleon 054 yang merupakan kapal milik Stasiun PSDKP Kupang. Dalam kegiatan ini dilakukan pemeriksaan terhadap 10 (sepuluh), terdapat 5 (lima) kapal perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan tersebut tanpa dokumen yaitu : tidak memiliki dokumen keseluruhan, SPB dan SLO habis masa berlaku.
- 4) Gelar operasi pengawasan tahap 4 (empat) Di Perairan NTT ini di laksanakan selama 5 (lima) hari, yaitu terhitung dari tanggal 29 November - 2 Desember 2022 dengan ketentuan 4 (empat) jam patroli setiap harinya (total waktu patroli 25 jam). Adapun lokasi kegiatan pengawasan dan pemantauan ini meliputi beberapa wilayah antara lain: Perairan Laut Timor. Sarana Kapal Pengawas yang digunakan dalam Patroli Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Di Perairan NTT ini adalah Kegiatan patroli menggunakan kapal pengawas Napoleon 054 yang merupakan kapal milik Stasiun PSDKP Kupang. Dalam kegiatan ini dilakukan pemeriksaan terhadap 10 (sepuluh) dan 5 (lima) kapal perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan

tersebut tanpa dokumen yaitu : tidak memiliki dokumen keseluruhan, SPB dan SLO habis masa berlaku, membawa ABK tidak sesuai dengan yang tertulis pada SPB.

- b. Belanja Perjalanan Dinas dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.801.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.801.000,- atau 100% yang dialokasikan untuk kegiatan koordinasi kegiatan pengawasan (bantuan kepada pokmaswas, kapal pengawas yang rusak, penambahan polsus dan PPNS) melalui kegiatan Rakernis. Output kegiatan ini adalah terlaksananya kolaborasi kegiatan pengawasan antara pemerintah pusat dan daerah.
- c. Belanja Modal Komputer Unit dengan pagu sebesar Rp. 8.951.200,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.951.200,- atau 100% yang dialokasikan untuk pembelian 1 (satu) Unit Laptop untuk menunjang kegiatan Bidang PSDKP. Output kegiatan ini adalah tersedianya belanja modal kegiatan bidang PSDKP.

Selain melaksanakan kegiatan yang menggunakan dana yang bersumber dari APBD, bidang PSDKP juga melakukan kegiatan yang bersumber dari APBN, adapun rincian kegiatan yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

a. Kegiatan Pembinaan POKMASWAS

Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan antara lain:

1) Pembuatan kaos pokmaswas

Kegiatan ini mengalokasikan pagu sebesar Rp. 20.600.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 20.600.000,- atau 100% dengan hasil kegiatan terakomodirnya kaos pokmaswas sejumlah 100 (seratus) buah untuk anggota pokmaswas yang aktif dan tersebar di 7 (tujuh) Cabang Dinas.

2) Pembinaan pokmaswas

Kegiatan ini mengalokasikan pagu sebesar Rp. 39.120.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 39.120.000,- atau 100% yang dilaksanakan pada Bulan Maret di Kabupaten Rote Ndao, Bulan Juni Kabupaten Alor dan Bulan Agustus Kabupaten Sumba Timur. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan pembinaan pokmaswas sejumlah 20 (dua puluh) orang.

3) Konsolidasi pokmaswas

Kegiatan ini mengalokasikan pagu sebesar Rp. 17.563.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 17.563.000,- atau 100% yang dilaksanakan di 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka. Fungsi dan peran dari Pokmaswas adalah membantu pengawasan perairan di daerahnya dan 1 (satu) pokmaswas "Tun Am"

yang aktif diikutsertakan dalam kegiatan penilaian pokmaswas. Output dari kegiatan ini adalah terselenggaranya kegiatan pengawasan di 3 (tiga) kabupaten.

Selain melaksanakan kegiatan yang menggunakan dana yang bersumber dari APBD, bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) juga melakukan kegiatan yang bersumber dari APBN, adapun rincian kegiatan yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

a. Belanja honor operasional satuan kerja

Kegiatan ini mengalokasikan pagu sebesar Rp. 28.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 28.800.000,- atau 100% dengan output terlaksananya kegiatan satker 05.

b. Belanja barang persediaan barang konsumsi

Kegiatan ini mengalokasikan pagu sebesar Rp. 772.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 772.000,- akan tetapi kegiatan ini mengalami refocusing anggaran.

c. Penyusunan dokumen perencanaan program dan anggaran

Kegiatan ini mengalokasikan pagu sebesar Rp. 1.200.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.200.000,- atau 100% dengan output tersedianya dokumen perencanaan program dan anggaran.

d. Perjalanan rakernis

Kegiatan ini mengalokasikan pagu sebesar Rp. 15.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 15.000.000,- atau 100% dengan output terlaksananya kolaborasi kegiatan pengawasan antara pemerintah pusat dan daerah.

e. Honor operasional satuan kerja

Kegiatan ini mengalokasikan pagu sebesar Rp. 3.600.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.600.000,- atau 100% dengan output terinputnya data Smart dan e-Monev.

f. Belanja bahan

Kegiatan ini mengalokasikan pagu sebesar Rp. 2.480.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.480.000,- atau 100% dengan output Tersedianya laporan bulanan, triwulan dan tahunan.

g. Honor operasional satuan kerja

Kegiatan ini mengalokasikan pagu sebesar Rp. 5.400.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.400.000,- atau 100% dengan output terinputnya data SAI, E-Dalwas dan BMN

h. Belanja bahan

Kegiatan ini mengalokasikan pagu sebesar Rp. 1.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.800.000,- atau 100% dengan output tersedianya laporan kegiatan.

i. Belanja perjalanan dinas dalam kota

Kegiatan ini mengalokasikan pagu sebesar Rp. 3.600.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.600.000,- atau 100% dengan output Terselesaikannya kegiatan keuangan di KPPN

j. Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota

Kegiatan ini mengalokasikan pagu sebesar Rp. 28.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 28.000.000,- atau 100% dengan output terlaksananya kegiatan rekonsiliasi

Kegiatan strategis Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) antara lain sebagai berikut:

a. Perlengkapan POKMASWAS

Sebanyak 4 (empat) paket peralatan POKMASWAS dengan rincian menggunakan dana Alokasi Khusus (DAK) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 119.662.440,- yang terealisasi sebesar 100%.

5. Program Pengelolaan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan (P3KP)

Pengelolaan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan (P3KP), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 596.282.600,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 594.666.200,- atau 99,72% dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a. Promosi olahan produk perikanan yang dilakukan oleh bidang P3KP yang merupakan salah satu bentuk kampanye Gerakan memasyarakatkan Makan Ikan dengan tujuan kampanye Gerakan memasyarakatkan adalah meningkatkan angka Konsumsi Ikan.
- b. Rekomendasi Perijinan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengeluarkan PERDA nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengendalian Usaha Perikanan maka fungsi pengendalian, pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan dalam usaha perikanan telah diatur sesuai dengan kewenangan pada Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Republik Indonesia yang berada pada 4 mill hingga 12 mill laut, sedangkan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota kurang dari 4 mil. Disamping itu bagi kabupaten/kota yang memiliki Unit Pengolahan Ikan yang belum memiliki ijin agar dapat segera mengurus ijin tersebut. Melihat kenyataan yang ada maka pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Kelautan dan Perikanan akan melayani Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Teknis Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) bagi Pembeli, Penampungan,

Pengolahan dan Pemasaran hasil perikanan dan selanjutnya melakukan Pembinaan dan Monitoring di kabupaten/kota. Sepanjang tahun 2022 Dinas Kelautan dan Perikanan mengeluarkan rekomendasi SIUP sebanyak 74 (tujuh puluh empat) Rekomendasi serta Sertifikat kelayakan Pengolahan Pengolahan atau disingkat SKP sebanyak 47 (empat puluh tujuh).

- c. Pengadaan Bantuan Coolbox berinsulasi. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang tersebar di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya di lokasi-lokasi dengan keterbatasan sarana dan prasarana penanganan dan pengolahan ikan yang memadai, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan akan memfasilitasi pengadaan sarana Peralatan Pengolahan berupa Coolbox Berinsulasi dengan tujuan pemberian bantuan pemerintah berupa sarana peralatan pengolahan berupa Coolbox Berinsulasi adalah untuk meningkatkan kuantitas dan nilai tambah produk perikanan, serta meningkatkan mutu dan keamanan hasil perikanan. Bantuan yang di salurkan kepada masyarakat sebanyak 20 (dua puluh) unit coolbox berinsulasi.
- d. Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kelompok (POKIR) (bantuan Coolbox). Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang tersebar di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya di lokasi-lokasi dengan keterbatasan sarana dan prasarana penanganan dan pengolahan ikan yang memadai, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan memfasilitasi pengadaan sarana Peralatan Pengolahan berupa Coolbox. Tujuan pemberian bantuan pemerintah berupa sarana peralatan pengolahan berupa Coolbox adalah untuk meningkatkan kuantitas dan nilai tambah produk perikanan, serta meningkatkan mutu dan keamanan hasil perikanan. Total sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) unit Coolbox dalam proses pendistribusian ke 19 Kabupaten/Kota.
- e. Sistem Informasi dan Promosi Produk Olahan Perikanan Diseminasi ATI dalam rangka Safari/ Kampanye Gemarikan (Pengadaan Bantuan Olahan Bandeng Presto)/Program NTT Bangkit. Diseminasi ATI Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan dalam rangka kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) Ikan (Bantuan Olahan Bandeng Presto) adalah kegiatan promosi peningkatan konsumsi ikan pada kelompok target tertentu yang menitikberatkan pada penyampaian komunikasi, informasi dan edukasi tentang makan ikan serta manfaatnya bagi kesehatan, kekuatan dan kecerdasan yang

melibatkan seluruh stakeholder.

- f. Penyusunan AKI. Berdasarkan data statistik menunjukkan bahwa jumlah penduduk dan potensi perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur sangat tinggi sehingga diharapkan dapat mendukung tingkat konsumsi ikan masyarakat, namun kenyataannya Angka Konsumsi Ikan (AKI) Propinsi NTT tahun 2020 baru mencapai 40,39 Kg/Kapita/Tahun (kategori cukup). Oleh karena itu melalui upaya kampanye, Gerakan makan Ikan (GEMARIKAN) dan Diseminasi Alih Teknologi dan Informasi (ATI) yang dilakukan, mampu mendorong segenap lapisan masyarakat untuk sadar akan pentingnya mengkonsumsi ikan, sehingga makan ikan menjadi budaya. Diharapkan agar melalui kegiatan Survey dan Pengkajian Angka Konsumsi Ikan (AKI) diperolehnya data yang valid sehingga menjadi acuan untuk menyusun program kerja yang mampu mendorong segenap lapisan masyarakat untuk sadar akan pentingnya mengkonsumsi ikan, sehingga makan ikan menjadi budaya bangsa. Berdasarkan kegiatan tersebut diperoleh Angka Konsumsi Ikan (AKI) 2021 Provinsi NTT sebesar 48,50 kg/Kapita/Tahun
- g. Rehab Bangunan RUN. salah satu sarana penunjang pemasaran adalah gedung yang layak untuk digunakan dengan adanya peningkatan mutu atau Kualitas bangunan sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya dan dan memberi kontribusi positif. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan pada TA. 2022 merencanakan melakukan rehabilitasi gedung bangunan Rumah Usaha Niaga akibat badai seroja yang menyebabkan gedung tersebut mengalami beberapa kerusakan, sehingga untuk itu dilakukan rehabilitas gedung sehingga layak untuk dipergunakan sebagai salah satu saran promosi produk kelautan dan perikanan. Kegiatan promosi produk olahan perikanan dilaksanakan dengan harapan agar dapat meningkatkan minat mengkonsumsi ikan di masyarakat sehingga bermanfaat bagi kesehatan selain cerdas, dan kuat. Kegiatan ini yang diharapkan agar pengolah dapat menghasilkan produk olahan yang beranekaragam dan memperkenalkan jenis olahan berbahan baku ikan dan rumput laut pada masyarakat.

C. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai target pendapatan murni sebesar Rp 23.000.000.000 akan tetapi mengalami penurunan dalam dokumen DPPA sebesar 4.077.900.000,- menjadi 18.922.100.000,- dengan capaian sebesar Rp 7.562.645.232,05,- atau 39,97% dengan rincian pada tabel di bawah ini :

NO	DASAR HUKUM	KODE REKENING	URAIAN	TARGET DPA	TARGET DPPA	Realisasi	%	KET
						s/d Desember		
1	2	3	4		5	8	9	10
		4 4.1 4.1.02 4.1.02.02	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah (PAD) Retribusi Daerah Retribusi Jasa Usaha					
A.	Perda No. 81 Tahun 2019	4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	932,125,000	932,125,000	1,719,211,005	184.44	
		4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	932,125,000	932,125,000	1,719,211,005	184.44	
			Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	932,125,000	932,125,000	1,719,211,005	184.44	
B.	Perda No. 81 Tahun 2019	4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	117,875,000	117,875,000	174,663,000	148.18	
		4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	117,875,000	117,875,000	174,663,000	148.18	
			Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	117,875,000	117,875,000	174,663,000	148.18	
C.	Perda No. 81 Tahun 2019	4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	1,050,000,000	1,050,000,000	722,762,184	68.83	
		4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	1,050,000,000	1,050,000,000	722,762,184	68.83	
			Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	1,050,000,000	1,050,000,000	722,762,184	68.83	

D.	Perda No.81 Tahun 2019 dan	4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	20,900,000,000	16,822,100,000	4,946,009,043	29.4	
	Perda No. 7 Tahun 2020	4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Berupa Bibit atau Benih Ikan	20,900,000,000	16,822,100,000	4,946,009,043	29.4	
			Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Berupa Bibit atau Benih Ikan	20,900,000,000	16,822,100,000	4,946,009,043		
			JUMLAH	23,000,000,000	18,922,100,000	7,562,645,232	39.97	

D. PERMASALAHAN YANG DI HADAPI

1. Permasalahan Yang Dihadapi

- a. Dampak dari badai seroja di Tahun 2021 yang menyebabkan banyak kerusakan infrastruktur baik sarana maupun prasarana sehingga produksi budidaya menurun;
- b. Banyaknya armada dan prasarana baik itu dermaga dan pelabuhan yang mengalami kerusakan disebabkan badai seroja;
- c. Penurunan mutu induk dalam proses budidaya di beberapa instalasi (BBIS Noekele dan BBIP Tablolong) disebabkan karena induk sudah mengalami penurunan mutu;
- d. Kurangnya pasokan air akibat saluran air tani yang tertutup material dan rusaknya sumur bor yang ada di instalasi BBIS Noekele yang menyebabkan kegiatan budidaya berjalan kurang lancar;
- e. Masih ada beberapa kolam yang mengalami kebocoran, hal ini mengakibatkan menurunnya kemampuan kolam untuk menampung air untuk proses budidaya;
- f. Banyak benih dan larva yang mati disebabkan oleh serangan lumut;
- g. Masih kurang sarana dan prasarana pendukung produksi pada daerah yang dianggap potensial;
- h. Belum tersedianya sarana rantai dingin secara menyeluruh sampai ke daerah pelosok;
- i. Banyaknya refocusing dan realokasi anggaran kegiatan prioritas dengan sub kegiatan dengan output dan outcome utama yang penting tidak mencapai target;
- j. Penyediaan data dan informasi terkait data bidang budidaya dan perikanan tangkap yang sering mengalami keterlambatan.

2. Upaya pemecahan Masalah

- a. Diperlukan rehabilitasi sarana dan prasarana bagi kelompok pembudidaya sehingga produksi bisa tercapai selain itu kolaborasi dengan lembaga mitra terkait;
- b. Diperlukan perbaikan sarana, prasarana dan keselamatan pelayaran baik melalui pendanaan APBD dan APBN atau pihak terkait lainnya sehingga kegiatan operasional pelabuhan dan produksi perikanan tangkap bisa tercapai;
- c. Diperlukan bimbingan teknis untuk seleksi ikan yang benar lewat *selective breeding* untuk memperbaiki kualitas genetik dari induk ikan hasil seleksi. Selain itu perlu dianggarkan pengadaan calon induk untuk memperbaiki kualitas produksi sehingga produktivitas tercapai;
- d. Melakukan pengontrolan air baik di saluran air tani baik maupun di saluran utama;

- e. Melakukan perbaikan pada kolam-kolam yang mengalami kebocoran;
- f. Dilakukan pembersihan lumut pada permukaan kolam secara rutin;
- g. Dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga melalui MOu dalam pengelolaannya;
- h. Pemberian bantuan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) dengan membuat jaringan distribusi produksi perikanan dan membangun fasilitas pasca panen berupa ICS (*Integrated Coldstorage System*) di daerah yang dianggap potensial;
- i. Memperhatikan indikator kinerja utama sebelum melakukan refocusing/realokasi anggaran sehingga target dapat tercapai;
- j. Melakukan kolaborasi yang baik dengan Dinas Perikanan Kabupaten/kota dan KKP-RI terkait penyediaan data dan informasi perikanan baik budidaya dan perikanan tangkap.

BAB. IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 terealisasi sebagai berikut :

1. Total Dana yang dikelola Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 dari APBD I (Belanja Publik) mencapai Rp. 49.453.248.701,- Realisasi pelaksanaan selama Tahun 2022 secara keseluruhan mencapai Fisik 92,66% dan Keuangan Rp. 45.821.665.542,-. (92,66%).
2. Pengelolaan APBN secara keseluruhan mencapai Rp. 3.940.185.000,- dengan realisasi pelaksanaan fisik mencapai 99,02% dan keuangan 99,02% atau Rp. 3.901.447.529,- .
3. Realisasi komponen target Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 adalah :
 - a. Produksi Perikanan Tangkap sebesar 191.000* Ton (103,24%) sedangkan Produksi Perikanan Budidaya sebesar 1.169.000* Ton (100,37%)
 - b. Penerimaan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp. 7.562.645.232.05,- atau 39,97% dari target Rp. 18.922.100.000,-

B. SARAN

Dinas Kelautan Dan Perikanan (DKP) Provinsi NTT akan mengoptimalkan potensi perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya para nelayan dan pembudidaya melalui beberapa bidang antara lain: bidang Pengelolaan Ruang Laut Dan Perikanan Budidaya (PRLPB), Perikanan Tangkap (PT), Pengolahan Dan Pemasaran Produk Kelautan Dan Perikanan (P3KP) dan bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (PSDKP).

Pada bidang P3KP pengembangan kegiatan melalui berbagai macam olahan produk olahan dari hasil perikanan yang memiliki nilai ekonomis berdaya saing tinggi diharapkan mampu mendorong percepatan peningkatan perekonomian rakyat. Kampanye Gemarikan diharapkan mampu memasyarakatkan masyarakat gemar makan ikan sehingga kebutuhan gizi dapat terpenuhi.

Untuk bidang perikanan tangkap akan ditingkatkan sarana dan prasarana alat tangkap (kapal) untuk nelayan sehingga penyerapan tenaga kerja dapat tercapai dan angka pengangguran dapat ditekan.

Kegiatan budidaya Kerapu merupakan salah satu kegiatan unggulan pada Program pengelolaan Perikanan Budidaya, yang sudah dimulai dari beberapa tahun sebelumnya. Selama tahun 2022,

pengembangan kegiatan budidaya di Kampung Budidaya yang dilakukan di Pulau Semaui Kabupaten Kupang dengan Komoditi Ikan Kerapu dan Kakap yang diharapkan mampu mendokrak produksi Budidaya khususnya budidaya perikanan air laut. Sektor pemanfaatan ruang laut menginventarisir perijinan pemanfaatan ruangan laut yang diperuntukan untuk wisata bahari, pembangunan dermaga pariwisata, budidaya kerang mutiara, pembangunan vila dan resort dan ketenaga kelistrikan.

Walaupun Kapal pegawasan milik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT terdampak badai Seroja akan tetapi Selama tahun 2022 bidang PSDKP tetap melaksanakan gelar operasi berkolaborasi dengan Stasiun PSDKP Kupang , Lantamal dan pihak terkait lainnya dalam rangka menekan angka IUU Fishing.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur ini disusun berdasarkan hasil pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi melalui berbagai kegiatan di Tahun 2022, semoga bermanfaat.

LEMBARAN VERIFIKASI LEVEL 1 LKIP 2022

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No	Reviewer	Catatatan /koreksi
1	Fungsional Perencana	- Verifikasi data capaian bidang dan kendala pencapaian indikator, PK 2022 - Perhitungan prosentase capaian - Edit penulisan, font, kerapian, konsistensi
2.	Sekretaris	
3.	Plt.Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. NTT	

Kupang, 26 Januari 2023
Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

STEFANIA TUNGA BORO, S.Pi, MM

Pembina Tingkat I
NIP. 197307141998032011